

Penolakan Vaksinasi Covid-19 Masyarakat DKI Jakarta: Disinformasi dan Anti-Sains

Nur Dewi Safitri, Sakir , Fairuz Arta Abhipraya
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

Abstract

This article discusses the doubts born in Jakarta about Covid-19 vaccination that has an impact on the crisis of public trust. In the world of health, vaccination becomes part of the health body because it has the function to prevent various diseases so that it has the potential to save lives and of course have a good impact on the economy of a country. The purpose of this article is to examine (1)the factors behind the public's hesitation in vaccinating, (2)how the government responds to this, (3) the impact of these doubts. In conducting the research, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis techniques, with a case study approach. The case study raised is about the doubts of the people of Jakarta in vaccinating Covid-19. In collecting data, researchers used library studies sourced from articles as well as journals. The results of this study show that doubts born in the community are caused by people who are not pro to the government. Not only that, there are other indicators, namely distrust of science, distrust of the government and pharmaceutical companies, excessive attitudes from the government to influence the public, and the continuity of communication between the public and the government

Keywords: *disinformation, public distrust, covid-19 vaccination*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai keraguan yang lahir di masyarakat Jakarta mengenai vaksinasi Covid-19 yang berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat. Dalam dunia kesehatan, vaksinasi menjadi bagian dari tubuh kesehatan karena didalamnya memiliki fungsi untuk mencegah berbagai penyakit sehingga berpotensi dalam menyelamatkan nyawa dan tentunya berdampak baik pula terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan dituliskannya artikel ini yakni untuk mengkaji (1)faktor yang melatarbelakangi masyarakat ragu melakukan vaksinasi, (2)bagaimana sikap pemerintah merespon hal ini, (3) dampak daripada keraguan ini. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat yakni mengenai keraguan masyarakat Jakarta dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi perpustakaan yang bersumber dari artikel serta jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keraguan yang lahir di masyarakat disebabkan oleh masyarakat yang tidak pro kepada pemerintah. Tak hanya itu, terdapat indikator lainnya yakni adanya ketidakpercayaan akan sains, ketidakpercayaan akan pemerintah serta perusahaan farmasi, sikap berlebihan dari pemerintah untuk mempengaruhi publik, serta adanya ketidaksinambungan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Kata kunci: *disinformasi, ketidakpercayaan publik, vaksinasi Covid-19*

PENDAHULUAN

Sejak Desember 2019 hingga saat ini sebagian besar negara masih berjuang melawan pandemic Covid-19 ditengah krisisnya berbagai macam aspek yang diakibatkan, termasuk Indonesia. Corona

Virus Disease 2019 atau kerap disapa dengan Covid-19, merupakan virus yang menjangkiti seluruh sistem paru-paru manusia, ditularkan melalui benda cair yang keluar dari mulut serta hidung baik air liur dan batuk, bahkan dengan benda mati seperti uang dan lainnya. 3 Mei 2021, World Health Organization (WHO)

telah mencatat kasus terkonfirmasi Covid-19 secara global sebanyak 152,534,452 jiwa termasuk 3,198,528 jiwa dinyatakan meninggal.

Kondisi ini mendorong setiap pemerintahan negara untuk menjaga komunikasi public dengan cara memberikan pelayanan informasi terkait perkembangan pandemic Covid-19, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri dalam menjaga komunikasi public ditengah pandemic Covid-19, pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Satgas Covid-19) guna mengkoordinasikan tiap lembaga dalam upaya menanggulangi bencana non-alam ini. Pemerintah bersama Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Satgas Covid-19) meluncurkan situs www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi terkait perkembangan dan penanggulangan Covid-19 yang bekerjasama dengan WHO dan UNICEF. Situs hasil produksi pemerintah berisikan data grafik terkonfirmasi positif, Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan pasien meninggal (Indonesia T. K., 2020).

Dalam situasi bencana kesehatan seperti ini, komunikasi sangat penting dibangun serta dijaga. Tentunya, komunikasi ditengah pandemic memiliki ragam instruksi serta memiliki spesifiknya masing-masing yang menimbulkan adanya risiko, sebutan ini kerap disapa dengan komunikasi risiko. Komunikasi risiko merupakan salah satu elemen dari mitigasi bencana. Focus komunikasi risiko ini mengarah pada pihak yang berpotensi tertular atau bahkan sudah terinfeksi, mereka harus melakukan berbagai macam pencegahan demi dirinya dan orang lain. Dalam dunia kesehatan, prinsip dasar komunikasi risiko ini dibangun atas dasar guna membangun kepercayaan public, transparansi data, penyampaian informasi yang cepat dan tanggap, serta mengupdate setiap perkembangan informasi terkait pandemi Covid-19 (RI, 2020).

Faktor terpenting dalam mencegah peningkatan penyebaran virus Covid-19 terletak pada pemberdayaan masyarakat dengan informasi yang baik. Mendapatkan informasi yang sehat tentunya membutuhkan komunikasi yang sehat juga. Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam mencapai suatu tujuan baik bersama maupun individu. Dalam melakukan komunikasi, tentunya kita akan mendapatkan sebuah hasil, hasil inilah yang dapat kita sebut dengan informasi. Informasi merupakan pesan/isi dari sebuah komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, terdapat unsur "gangguan". Unsur inilah yang dapat menjadi patokan sebuah komunikasi dapat dikatakan berhasil atau tidak. Terdapat 4 macam gangguan dalam komunikasi yakni, gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantic, dan gangguan psikologis. Jika sebuah komunikasi mengalami keempat gangguan ini atau salah satu maka dapat dikatakan sebuah komunikasi berpotensi mengalami disinformasi (Hayat, 2020). Disinformasi merupakan sebuah berita yang tidak akurat kebenarannya yang disebar luaskan kepada orang lain dengan sengaja untuk membingungkan public. Objek dalam berkomunikasi merupakan public baik individu maupun kelompok, jika public ini terus-menerus mengkonsumsi serta mempercayai berita yang tidak akurat kebenarannya lalu ketika terbukti bahwa berita itu tidak benar adanya maka public benar-benar tidak akan mempercayai sumber informasi tersebut. Hal ini dapat disebut dengan fenomena *public distrust* atau ketidakpercayaan public (Puspitasari, 2020).

Komunikasi ditengah pandemic tentunya merupakan hal yang paling riskan. Media konvensional yang dibangun pemerintah tentunya membangun banyak opini public yang nantinya akan mempengaruhi produk informasi dan regulasi. Respon masyarakat menjadi kunci utama dari keberhasilan suatu informasi dan regulasi, sejauh mana masyarakat dapat menerima dan menolak.

Ketika informasi yang disampaikan pemerintah kepada publik dianggap benar dan adil atas kebutuhan masyarakat ditengah pandemic, maka masyarakat akan memberikan respon baik dengan bentuk percaya akan informasi serta mengimplementasikan segala regulasi, begitupun sebaliknya (Murphy, 2004).

Kasus penolakan akan regulasi pemerintah sering kali ditemukan dan memang menjadi hak public dalam menerima atau menolaknya. Mengingat pemerintah Indonesia menyebarluaskan segala informasi melalui media konvensional/media komunikasi massa yang menimbulkan munculnya opini public. Mengutip James G. Webster, di Sullivan (2013) berpendapat bahwa jenis media ini berpotensi mendorong opini public. Ketika ketidakpercayaan public muncul, maka pemerintah akan mengupayakan segala cara dengan sumber daya yang ada dalam bagaimana cara menyakini suatu regulasi kepada public baik dalam paksaan maupun tanpa paksaan bahkan pemerintah bisa saja berbohong dengan public dalam bernegosiasi demi mendapatkan kepercayaan. Tentu, Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwasanya komunikasi yang baik akan menghasilkan informasi yang baik, nilai baik inilah yang akan mempengaruhi kepercayaan public (Andhika, 2018).

Indikator lainnya mengenai keraguan dalam melakukan vaksinasi Covid-19 selain disinformasi yang berimbas pada ketidakpercayaan public juga dengan adanya sikap anti-sains. Dalam perspektif sosial, anti-sains membuat para intelektual berpikir konspiratif. Para intelektual yang berpikir konspiratif menganggap semua berita atau informasi merupakan hasil rekayasa dari sekelompok manusia yang berkuasa (Zein, 2019). Sedangkan pada perspektif sosial-agama, anti-sains lebih memiliki keterkaitan dengan individual yang fanatic dengan agamanya. Seseorang yang menolak divaksin dengan dalih alasan agama sebagian besar

takut akan bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin tersebut maksudnya halal atau haramnya. Tak hanya pada vaksinasi, terdapat contoh lainnya seperti pemakaian alat KB baik suntik, pil, steril dan lainnya. Pemikiran anti-sains yang hadir di masyarakat tentunya berkaitan dengan misinformasi yang sulit sekali untuk dibenahi. Karena setiap individu yang berpikiran anti-sain memiliki sifat keras kepala dan teguh pada pendiriannya, sehingga hal ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah dalam menumbuhkan rasa kepercayaan public. (Alkaf, 2020)

Mengenai kasus disinformasi yang berimbas pada ketidakpercayaan public dapat dilihat dari kondisi saat ini. Kondisi pandemi Covid-19 memaksakan seluruh negara yang terinfeksi termasuk Indonesia terpaksa harus siap menghadapi konsekuensi yang diberikannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau sering disapa dengan *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kemungkinan besar asal virus Corona dari peternakan satwa liar yang berada di Pasar Grosir Makanan Laut Wuhan, Provinsi Yunnan, China Selatan. Virus ini bekerja pada sistem pernafasan manusia sehingga cara penularan virus ini melewati air liur pasien. Kasus pertama di China khususnya pada kota Wuhan terdeteksi pada bulan November 2019 lalu kian hari kian mengalami peningkatan (Azizah, 2020). Peningkatan inilah yang membuat penyakit endemic menjadi penyakit pandemic karena penularan virus yang cukup signifikan terlebih saat itu belum ada penutupan akses keluar masuk warga negara asing ke negeri China sehingga memudahkan penyebaran virus. Setiap negara yang terjangkit wabah ini memiliki kurun waktu sekitar dua minggu sampai dengan dua bulan untuk mempersiapkan segala pencegahan sebelum wabah ini menjangkit negara tersebut. Namun, berbeda halnya dengan Indonesia. Nyatanya, jauh sebelum adanya kasus pertama tampaknya pemerintah terlihat

santai dan tidak mempersiapkan beragam macam antisipasi dini seperti ditutupkannya akses masuk untuk WNA dan lain sebagainya sehingga public mencap pemerintah tidak peduli. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang tidak selaras antara pakar dengan pemerintah dalam menganalisis kasus pertama di Indonesia. Menurut pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menganalisis bahwasanya kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Januari 2020 tepatnya minggu ke-3 Januari, dengan bukti adanya Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) di daerah. Sedangkan pada versi pemerintah, Presiden Joko Widodo mengatakan kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada awal Maret 2020 yang menjangkiti seorang perempuan dengan ibunya (Azzahra, 2020). Dengan contoh real ini, dapat dikatakan sebagai misinformasi, ketidaksimpang siuran suatu berita menjadikan public ragu dengan informasi yang datang, baik dari pakar ataupun pemerintah.

Mengingat ragamnya instruksi yang menimbulkan adanya ragam opini public yang berdampak pada kepercayaan masyarakat, maka kepercayaan public saat ini menjadi sebuah kepentingan, The Organization for Economic Co-operation and Development (2020) memaparkan 6 indikator untuk membangun kembali kepercayaan public dari pemerintah yakni, Keandalan, Responsif, Keterbukaan, Regulasi yang Lebih Baik, Integritas & Kewajaran, dan Pengambilan Kebijakan Inklusif untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Merujuk pada pembahasan yang telah dipaparkan, indicator yang mempengaruhi kepercayaan publik beserta langkah untuk membangun kembali kepercayaan public telah dibuktikan oleh sebagian besar para peneliti. Mengangkat tema ini tentu menjadi hal yang menarik karena mengingat saat ini, pandemi Covid-19 menjadi focus utama

masyarakat Indonesia beserta pemerintahannya. Dalam kajian ini, peneliti hanya focus pada satu studi kasus. Studi kasus yang diangkat yakni mengenai penolakan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh beberapa factor. *Pertama*, menurut penuturan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada bulan Januari 2021 Jakarta setiap harinya mengalami penambahan kasus Covid-19 sebanyak 2.959, artinya Jakarta masih memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi (Wiryono, 2021). *Kedua*, menurut hasil survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan Jakarta peringkat 1 penolakan vaksinasi tertinggi sebanyak 33%. Tentu dengan tingginya angka penolakan ini sejalan dengan bagaimana efektivitas dari vaksin tersebut. *Ketiga*, jika dilihat dari letak geografis, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang dimana memiliki julukan "Kota Metropolitan" sehingga kehidupan sosial masyarakat DKI Jakarta dapat dikatakan modern. Namun, mengapa dengan kemodernan ini masih ditemukan individu yang memiliki keterbelakangan pemikiran (Dewi Nurita, 2021). Hal ini memiliki sangkut paut dengan latar belakang pendidikan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, menganalisis studi kasus ini sangat penting untuk dianalisis guna mengetahui sebab penolakan masyarakat Jakarta dalam melakukan vaksinasi Covid-19 yang berujung pada ketidakpercayaan public serta bagaimana pemerintah berupaya memulihkan kepercayaan melalui manajemen informasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif menurut studi dari Denzin & Lincoln (1994) diartikan sebagai sebuah penelitian berlatar belakang ilmiah yang digunakan untuk memberikan serta menafsirkan suatu

fenomena yang terjadi. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif bukan berupa statistik, melainkan berupa analisis sehingga penelitian kualitatif ini lebih sering digunakan pada penelitian di bidang sosial. Tujuan dipilihnya penelitian kualitatif pada artikel ini guna mengetahui, mendapatkan, serta memberikan pemahaman terkait fenomena tersebut (Albi Anggito, 2018). Sedangkan, pendekatan deskriptif analisis dapat diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data dalam memecahkan suatu masalah dengan menampilkan objek penelitian seperti Negara, individu, kelompok non-masyarakat/masyarakat yang didasarkan pada fakta tertulis, perspektif dan sebagainya (Nawawi, 2015).

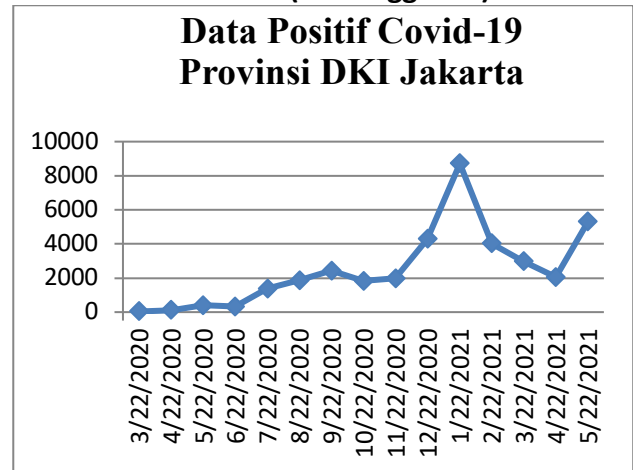
Teknik pengumpulan data melalui studi literatur perpustakaan. Studi perpustakaan merupakan metode dimana setelah ditemukannya topic oleh peneliti, peneliti melakukan kajian teoritis dan referensi terkait isu yang diangkat untuk dijadikan bahan atau sumber tertulis. Dalam mengambil sumber tertulis, peneliti merujuk pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel nasional dan internasional, makalah ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian (Nazir, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penularan Corona Virus/Covid-19 di DKI Jakarta terus-menerus mengalami penambahan serta perluasan wilayah sejak awal bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Namun, pada tanggal 20 November 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) melaporkan bahwasanya dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menjadi peringkat pertama yang memiliki jumlah kasus terbanyak sebesar 25,4%, disusul dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,9% serta Jawa Barat sebesar 9,6%. Melonjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta,

menjadi peluang pendonor virus kepada daerah lainnya

Grafik 1./Gambar 1.
Data Konfirmasi Positif Covid-19 Provinsi DKI Jakarta (Pertanggal 22)



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>

Hasil rekap data yang diambil melalui laman resmi info perkembangan kasus Covid-19 DKI Jakarta, menunjukkan bahwa angka kasus konfirmasi positif Covid-19 Provinsi DKI Jakarta pertanggal 22 yang dimulai bulan Maret 2020 hingga Mei 2021 mengalami penurunan hingga peningkatan.

Ketidakstabilan angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di DKI Jakarta bahkan se-Indonesia membuat Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah bekerjasama dalam menanggulangi bencana non-alam ini. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 dengan diadakannya program vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menuturkan perencanaan vaksinasi di Indonesia akan diluncurkan selama 4 tahapan penerima vaksin Covid-19. Tahap 1 dan tahap 2 akan diluncurkan pada bulan Januari hingga April 2021, dengan prioritas utama tahap 1 seluruh tenaga kesehatan dan tahap 2 yang terdiri dari TNI&Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan public. Sedangkan tahap 3 dan tahap 4 akan diluncurkan pada bulan April 2021 hingga Maret 2022, dengan prioritas utam tahap 3

masyarakat memiliki risiko penularan tinggi dan tahap 4 seluruh masyarakat Indonesia (Dewi, 2021). Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 mengenai Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid 19) telah diputuskan terdapat 7 jenis vaksin yakni, vaksin produksi PT. Bio Farma, Astra Zeneca, Novavax, Pfizer-BioNtech, Moderna, Sinopharm, dan Sinovac. Dari ketujuh vaksin tersebut, hanya terdapat tiga jenis yang telah diterima dan digunakan yakni vaksin Sinovac, PT. Bio Farma, dan Astra Zeneca (Dwianto, 2021).

Vaksin Covid-19

Vaksin Sinovac merupakan jenis vaksin pertama yang datang dan digunakan pertama kali oleh Indonesia dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 khususnya pada periode pertama. Vaksin Sinovac merupakan vaksin produksi dari China yang telah mendapatkan label mutu oleh World Health Organization (WHO) sehingga banyak Negara selain Indonesia yang menggunakan vaksin tersebut.

Gambar 2.

Infografis Tahap Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia



Merujuk pada infografis tahap kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, dapat dilihat bahwasanya vaksin Sinovac menduduki peringkat pertama dalam daftar pemesanan vaksin baik vaksin jadi maupun bahan baku, lalu disusul dengan vaksin Astra Zeneca, dan terakhir vaksin Sinopharm. Pemilihan Sinovac menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia didasarkan pada uji klinis tahap tiga yang dilakukan pada bulan Agustus 2020 oleh PT. Bio Farma dengan Tim Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, beserta Negara yang ikut menguji vaksin tersebut seperti Turki dan Brazil. Di Indonesia, hasil efikasi vaksin Sinovac telah mencapai 65,3%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar WHO yakni diatas 50%. Untuk mendukung pernyataan tersebut, efektifitas vaksin Sinovac dapat ditinjau dari hasil uji klinis yang dilakukan Universitas Padjajaran bersama PT. Bio Farma dengan melibatkan 1.620 relawan di Bandung sebagai percobaan vaksinasi, berdasarkan hasil uji klinis ditemukan adanya peningkatan serta pembentukan antibody sebesar 95 – 99% (sangat baik) sehingga dapat dikategorikan berpotensi menekan penyebaran Covid-19 (Kurnia, 2021). Dengan hasil penelitian ini pemerintah Indonesia merasa cukup dalam mempatenkan Sinovac menjadi andalannya, walaupun status Sinovac di World Health Organization (WHO) masih dalam proses persetujuan/perizinan melalui Emergency Use Listing Procedure (EUL)/Prequalification Programme (PQ) di WHO.

Ditengah proses perizinan vaksin Sinovac oleh badan WHO, Indonesia sudah terlanjur berhasil menjalani program vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 sampai dengan sekarang tahap 3. Jika dikatakan pada hasil uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac memiliki nilai efikasi 65,3% dalam melawan Covid-19, namun tetap mengindikasikan sisa persentasenya berpotensi kegagalan. Efikasi dapat dikatakan sebagai pertimbangan akan efektivitas suatu vaksin. Namun, jika meninjau dari fakta yang

ada dimana dari 1.620 relawan yang diuji klinis oleh UNPAD beserta PT. Bio Farma, 25 diantaranya tetap terpapar virus corona. Tak hanya para relawan, tetap terpaparnya virus corona dalam program vaksinasi walaupun sudah melakukan vaksinasi dua dosis, dialami pula dengan salah satu tokoh masyarakat yakni istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Efikasi inilah yang sering dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat, padahal program vaksinasi tersebut menjadi salah satu kunci dalam menekan penyebaran Covid-19 diseluruh penjuru tanah air (Indonesia T. C., 2021).

Bukan hanya pada masalah efektivitas kerja vaksin Sinovac, kehalalan dari vaksin Sinovac menjadi kontroversi di beberapa kalangan masyarakat. Padahal Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh mengeluarkan dua fatwa tentang vaksin Sinovac produksi China. Fatwa pertama, vaksin Sinovac halal dan suci untuk digunakan. Fatwa kedua, vaksin Sinovac sudah memiliki keamanan yang terjamin. Kedua fatwa ini, didukung dengan izin penggunaan darurat yang disahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (MUI, 2021). Namun, dibalik validnya vaksin Sinovac untuk digunakan, masih ditemukan beberapa kelompok masyarakat yang beranggapan sebaliknya. Tentunya, kedua permasalahan ini yakni efektivitas serta kehalalan tidak bisa terus-menerus dibiarkan berkembang biak begitu saja dikalangan masyarakat. Bagaimanapun juga keberhasilan dari program vaksinasi Covid-19 di Indonesia memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan para tokoh. Peran media sebagai sarana informasi ditengah pandemi juga dapat menjadi bahan acuan mereka dalam membentuk opini public yang nantinya akan berpengaruh pada respon partisipan (Diyah Indiyati, 2020).

Perkembangan Program Vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menargetkan 3.000.689 jiwa guna melaksanakan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta secara gratis dengan skala prioritas tenaga kesehatan, lansia, dan pelaku pelayan public. Per tanggal 30 Maret 2021, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.178.243 jiwa telah berhasil melakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama dan sebanyak 388.065 jiwa berhasil melakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua dengan melibatkan seluruh prioritas (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan public). Dengan rincian sebagai berikut: Tenaga kesehatan (dosis I/123.199 jiwa dan dosis II/103.537 jiwa) dengan total target 112.301 jiwa; lansia (dosis I/444.817 jiwa dan dosis II/42.494 jiwa) dengan total target 911.631 jiwa; serta pelayan public (dosis I/610.227 jiwa dan dosis II/242.034 jiwa) dengan total target 1.976.757 jiwa (Tobing, 2021). Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara realita dengan ekspektasi. Misal, pada target asli tenaga kesehatan ternyata lebih kecil dibanding dengan data terkonfirmasi telah vaksinasi, sedangkan pada target asli lansia dan pelayan public lebih besar dibanding dengan data terkonfirmasi telah vaksinasi. Ketidaksinambungan data antar ekspektasi dengan realita tentunya dilatar belakangi dengan respon masyarakat DKI Jakarta terhadap vaksin Covid-19, yang dimana pada saat itu PemProv DKI Jakarta dalam massa program vaksinasinya menggunakan vaksin jenis Sinovac yang memiliki banyak kontroversi didalamnya.

Persepsi Warga DKI Jakarta terhadap Vaksinasi Covid-19

Persepsi diartikan sebagai upaya individu untuk mampu memahami, merasakan, serta menilai suatu objek yang dilihat dari segala unsur objek tersebut. Dalam memahami bagaimana persepsi warga DKI Jakarta

terhadap vaksinasi Covid-19 dapat ditinjau dari survey yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Banyaknya kontroversi yang hadir mengenai vaksin Covid-19, tentunya melahirkan banyak persepsi individu yang nantinya berpotensi mengubah perilaku sekelompok manusia, sehingga menimbulkan kelompok pro dan kontra. Perilaku pro dan kontra dari masyarakat tentunya akan mempengaruhi sifat dari vaksin tersebut (Tasnim, 2020).

Salah satu lembaga survei yakni Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei keikutsertaan publik terhadap program vaksinasi Covid-19 di Indonesia berdasarkan wilayah. Dalam surveinya disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi peringkat pertama tingginya ketidakikutsertaan program vaksinasi Covid-19 sebesar 33% (Nurita, 2021). Ketidakikutsertaan vaksinasi tentunya dilatarbelakangi oleh dampak psikologis masyarakat baik dalam berfikir serta bersikap, yang timbul karena pandemi Covid-19. Buku berjudul "The Pandemic of Psychology" karya Taylor (2019) menjelaskan mengenai kondisi pandemi memberikan pengaruh pada psikologis individu secara lepas dan kokoh, baik dari cara berfikir, transformasi emosi, serta perilaku sosial yang dimana semua ini berpotensi menimbulkan konflik sosial jika yang dilahirkan dari persepsi individu tidak baik (Zalukhu, 2021).

1. Disinformasi

Respon setiap individu ketika menghadapi situasi penuh dengan perubahan seperti ini tentunya sangat beragam, tergantung bagaimana mereka menangkap serta mengelola suatu informasi. Informasi akan dikelola oleh otak sehingga memberikan respon/persepsi baik atau buruknya informasi tersebut. Respon ini akan mempengaruhi kehidupan sosial, terutama pada respon buruk, tentunya akan banyak prasangka didalamnya. Jika merujuk pada kemarin dan

hari ini, pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19, awalnya sangat percaya diri bahwa virus ini tidak akan menginfeksi Indonesia, namun nyatanya menginfeksi bahkan pemerintah Indonesia terbilang lamban dalam memproses permasalahan ini. Tingginya sikap percaya diri dan optimis seperti ini, menciptakan banyak ketakutan, penolakan, keresahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam memahami tingginya presentase penolakan vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat DKI Jakarta dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam memberikan informasi. *Pertama*, keterlambatan respon dari pemerintah Indonesia terkait penularan pertama kali di Indonesia menjadikan indikasi pertama ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. *Kedua*, disusul dengan munculnya regulasi dari PemProv DKI Jakarta terkait pandemi Covid-19 seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas belajar dan bekerja dari rumah, penutupan fasilitas umum (tempat ibadah, mall, dan lain-lain), pembatasan fasilitas umum, pembatasan transportasi, dan adanya larangan warga DKI Jakarta untuk keluar daerahnya. Ditetapkannya kebijakan yang secara langsung menyempitkan ruang masyarakat di publik tentunya menimbulkan pro serta kontra di masyarakat. Kelompok pro akan menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan PemProv DKI Jakarta dilakukan demi menekan angka penyebaran virus Covid-19. Namun, pada kelompok kontra akan menganggap banyak kontra terlebih pada kebijakan penutupan tempat peribadatan seperti gereja, masjid, dianggap tidak lazim. Walaupun semakin hari, segala regulasi ini telah dilonggarkan dan muncul regulasi baru yang lebih nalar, namun tetap regulasi pembatasan tersebut menjadi indikasi kedua munculnya ketidakpercayaan publik terhadap PemProv DKI Jakarta.

Ketiga, mulainya muncul regulasi kewajiban vaksinasi Covid-19 (Vaksin Sinovac) dengan segala kontroversi didalamnya baik

dari bahan baku vaksin tersebut, keefektifannya, serta efek sampingnya. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Safari mengabarkan terdapat 211 kasus meninggal dunia setelah melakukan vaksinasi Covid-19, baik pada vaksin Sinovac sebanyak 211 kasus dan 18 kasus vaksin AstraZeneca yang baru digunakan pada pekan ketiga bulan Maret 2021. Menurut hasil laporan, penyebab meninggal dunianya seseorang yang telah melakukan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac beragam diantaranya mereka yang melakukan vaksinasi sebelumnya telah terpapar Covid-19, memiliki penyakit bawaan yakni penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan fungsi ginjal, riwayat penyakit diabetes melitus, serta hipertensi berlebihan. Sedangkan pada vaksin AstraZeneca yakni, mengalami pusing dan demam serta mengalami radang paru-paru (Afifah M. Atiqah, 2021). Masih banyaknya kasus terpapar virus Covid-19 walau sudah menerima vaksinasi, tentu menguji pada keefikasian dari vaksin tersebut dalam melawan virus. Dalam situasi yang penuh dengan ketakutan serta kecemasan, membuat banyak dari masyarakat yang berfikir bahwa konsep vaksin Covid-19 sama seperti imunisasi polio dan penyakit lainnya, melakukan vaksinasi akan membuat dirinya kebal dengan virus tersebut. Padahal, realitanya tidak seperti itu, Kemenkes menyampaikan bahwa vaksin Sinovac hanya mencegah kematian dan meredakan gejala yang timbul akibat reaksi dari virus tersebut, dan tidak membuat diri kebal terhadap virus ini. Simpang siur informasi yang diberikan mengenai vaksin-vaksin Covid-19 menjadi indikasi ketiga terciptanya ketidakpercayaan publik. Tak hanya itu, ada satu hal pendukung dibalik warga Jakarta menolak melakukan vaksinasi yakni penolakan pertama kali di Indonesia yang dilakukan oleh tokoh politik Ribka Tjiptaning, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Keempat, datang dari masyarakat itu sendiri. Disaat kondisi pandemi, kita dipaksa mau tidak mau lebih sering menggunakan media dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Media dimasa pandemi menjadi senjata bagi pemerintah guna memberikan info terkait pengembangan penanganan Covid-19. Masyarakat menjadi pemeran utama dalam menyikapi pandemi. Banyak dari masyarakat memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan mengelola suatu informasi (Hermin Indah Wahyuni, 2021).

Keempat indikasi inilah yang mendukung mereka bertindak tidak percaya pada PemProv DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Rusaknya pemerintah dalam mengarahkan komunikasi massa yang efektif menumbuhkan kurangnya kemampuan massa dalam memahami informasi secara tepat dan otentik, terlebih dengan situasi seperti ini. Disinformasi timbul karena adanya kesimpang siuran suatu informasi dan informasi yang sengaja dikeluarkan oleh pihak penting secara berlebihan dan berbanding terbalik dengan realitanya (Diyah Indiyati, 2020).

2. Anti Sains

Merujuk pada indikasi keempat dalam disinformasi, tertera bahwa faktor masyarakat itu sendiri dapat menumbuhkan rasa tidak percaya. Sikap anti-sains salah satunya. Anti-sains berkembang ketika seseorang tidak percaya pada sains/ilmiah. Biasanya anti-sains didasari dengan pemikiran yang konspiratif dan pemikiran agamis.

Mereka yang berfikir secara konspiratif, akan memandang segala kejadian merupakan hasil rekayasa dari kelompok berkuasa, termasuk pada pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan teori konspirasi. Teori konspirasi yang terkenal mengenai pandemi ini yakni mereka (kelompok konspiratif) yakin bahwasanya virus Covid-19 ini sengaja diciptakan oleh lab biologis di Wuhan, China sebagai senjata biologis guna perang yang

sengaja dibocorkan oleh pihak lab. Tak hanya itu, hal ini didukung dengan prediksi salah satu film kartun yakni *The Simpson* yang menampilkan adegan kebocoran dan virus ini. bukan saja pada ranah kondisi pandemi, bahkan vaksin Covid-19 memiliki teori konspirasi. Mereka yang berfikir secara konspiratif, menganggap dengan segala pengetahuan yang ia dapat bahwa vaksin bagian dari bisnis kelompok penguasa dunia terutama Bill Gates. Dalam pidatonya pada tahun 2015 yang mewanti tumbuhnya virus baru yang menyeramkan. Disusul dengan pemikiran bahwa vaksin Covid-19 ditanam dengan teknologi microchip yang dapat dipantau oleh elit global, sehingga memiliki kesan setiap individu tidak merasakan "kebebasan" (Pranita, 2021).

Itulah beberapa teori konspirasi yang melejit di kehidupan sosial masyarakat termasuk pada masyarakat DKI Jakarta. Banyak penelitian psikologis meneliti mengenai latar belakang seseorang dapat percaya pada teori konspirasi, salah satunya terdapat faktor demografi. Teori konspirasi akan berkembang pada lingkungan yang memiliki pemikiran liberal, yang didalamnya terdapat ragam pemikiran. Teori konspirasi tidak hanya berjumlah satu atau dua teori, namun lebih dari itu. Individu yang memiliki pemikiran konspiratif akan memilah mana saja teori yang menurutnya dapat dipikir secara nalar (Zein, 2019).

Pada pemikiran agamis, khususnya dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Menurut survei SMRC secara nasional dalam aspek agama, penganut Islam mengaku tidak ingin melakukan vaksinasi/menolak dengan persentase sebesar 31% (Dewi Nurita, 2021).

Dalam memahami bagaimana penganut Islam menolak mentah untuk vaksinasi, tidak bisa dilihat dari sisi agamanya saja, namun harus dilihat dari pribadi individu juga. Agama Islam tidak melarang penganutnya untuk melakukan imunisasi/vaksin sebagai

pengecanaan suatu penyakit. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan ikhtiar dalam segala kehidupan termasuk dalam melakukan pencegahan suatu penyakit. Halal atau tidaknya bahan baku dari cairan tersebut, jika digunakan dalam keadaan mendesak/genting maka diperbolehkan dan tidak diharamkan. Individu yang menolak vaksin dengan dalih agama, mereka menolak atas keraguan halal atau tidaknya cairan tersebut dan tidak banyak dari mereka juga berfikir secara konspiratif dengan percaya bahwa vaksin/imunisasi membuat batas umur manusia untuk hidup.

Solusi

Penolakan yang terjadi didalam lingkup sosial masyarakat DKI Jakarta sebagian besar didasari atas minimnya budaya literasi. Merujuk pada penelitian tersebut, penolakan vaksinasi yang datang dari masyarakat DKI Jakarta dapat ditangani dengan penciptaan dan pemberdayaan informasi yang efektif kepada masyarakat. PemProv DKI Jakarta dalam menciptakan serta memberdayakan informasi telah menciptakan laman resmi perkembangan kasus Covid-19 DKI Jakarta yakni <https://corona.jakarta.go.id/id> . Laman ini berisikan perkembangan kasus Covid-19 (Positif, Negatif, Orang Tanpa Gejala, dan Meninggal Dunia), perkembangan vaksinasi Covid-19, informasi bantuan sosial, artikel dan berita mengenai perkembangan kasus Covid-19, serta terdapat kajian pencegahan virus Covid-19. Walau terlihat sudah sempurna dalam memenuhi kebutuhan informasi Covid-19, namun realitanya pemberian informasi yang diharapkan dapat diterima dan diakses dengan sasaran seluruh kelompok masyarakat, nyatanya tidak terpenuhi. DKI Jakarta dalam aspek demografinya memiliki ragam kelompok masyarakat dari yang tinggi hingga rendah. Ketidakberhasilan proses transfer informasi pada seluruh kelompok masyarakat diakibatkan oleh ketidakperhatian PemProv DKI Jakarta terhadap

mereka yang memiliki keterbelakangan. Dalam hal ini, PemProv DKI Jakarta harus sadar dan memberikan perhatian khusus pada mereka dalam program vaksinasi Covid-19. Mereka yang memiliki keterbelakangan mendapati informasi tentunya memiliki keterbelakangan literasi. Dengannya, maka PemProv DKI Jakarta harus berusaha membangun kembali media informasi yang efektif tanpa menghilangkan yang sudah ada. Pemberian informasi yang akurat dan baru melalui saluran TV akan membantu mereka (kelas rendah) untuk mendapatkan informasi. Tak hanya itu, pemberian edukasi mengenai (Covid-19, Program Vaksinasi Covid-19, dan laman resmi <https://corona.jakarta.go.id/id>) kepada mereka (kelas rendah) untuk membangun pemahaman mereka terhadap informasi tersebut (Aditya Yoga Purnama, 2021).

Dalam ranah agama, PemProv DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pakar kesehatan, dan Pemerintah Pusat dalam membangun kepercayaan publik terhadap kehalalan bahan baku vaksin. Dalam membangun kepercayaan publik, dibutuhkannya transparansi data mengenai vaksin tersebut dan penyampaian informasi tanpa berlebih-lebihan. PemProv DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat harus membangun kembali kepercayaan publik, karena kepercayaan publik akan membantu mengurangi resiko penyebaran virus.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh bangsa dan psikologis manusia. Takut, cemas, khawatir, panik telah menggerogoti perasaan tiap manusia. Hadirnya perasaan yang tentunya berpengaruh pada kondisi sosial, membawa Pemerintah Pusat Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi bencana non-alam ini. Namun, respon pemerintah dalam

menanggapi permasalahan ini dapat dikatakan terlambat. Sikap acuh yang tumbuh saat awal pandemi hadir, membuat masyarakat Indonesia tidak percaya pada Pemerintah Pusat. Segala upaya telah dikerahkan termasuk pada program vaksinasi Covid-19. Ketidakpercayaan yang telah terbangun sejak awal, menghambat proses program vaksinasi Covid-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Ketidakpercayaan masyarakat DKI Jakarta didasari atas informasi yang keliru, berlebihan, serta rendahnya sikap membaca dan menganalisis. Pemberian dan pemberdayaan informasi yang baru dan akurat serta pemberian edukasi mengenai virus Covid-19 dan vaksin menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik yang menjadi bagian dari komunikasi mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yoga Purnama, R. S. (2021, Februari). Solusi Bias Kognitif, Kesenjangan Digital dan Moralitas di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Edukasi dan Kemanusiaan*, 1(1), 63-67.
- Afifah M. Atiqah, I. A. (2021). *Komnas KIPi: 30 Meninggal Usai Vaksin Covid-19*. Jakarta: Narasi.
- Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In J. S. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 7-15). Jejak.
- Alkaf, M. (2020, Juni). Agama, Sains, Dan Covid-19: Perspektif Sosial-Agama.
- Andhika, L. R. (2018, April). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 2-4.
- Azizah, K. N. (2020). *Dugaan Kasus Pertama Virus Corona di China Terdeteksi pada November 2019*. Jakarta: detikHealth.
- Azzahra, T. A. (2020). *Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona*, FKM UI: Corona

- Masuk Sejak Januari*. Jakarta: detikNews.
- Dewi Nurita, K. S. (2021). *Survei SMRC: Warga DKI Jakarta Tertinggi Menolak Vaksinasi Covid-19*. Jakarta: Tempo.co.
- Dewi, R. K. (2021). *4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya*. Jakarta: KOMPAS.com.
- Diyah Indiyati, H. N. (2020). Media vs Kepercayaan Publik di Masa Pandemi. *Jurnal of Media and Communication Science*.
- Dwianto, A. R. (2021). *Ada 7 Jenis Vaksin COVID yang Digunakan di Indonesia, Sudah Tersertifikasi WHO?* Jakarta: detikHealth.
- Hayat, N. (2020). *Covid-19: Apa yang Membuat Kegagalan Komunikasi Pemerintah?* Jakarta: Remotivi.
- Hermin Indah Wahyuni, K. A. (2021). Problem Infodemic Dalam Merespon Pandemi Covid-19. Yogyakarta: Media FISIPOL UGM.
- Indonesia, T. C. (2021). *Alasan 25 Relawan Vaksin Sinovac Tetap Terkena Covid-19*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Indonesia, T. K. (2020). *Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Covid-19*. Jakarta: Kominfo.
- Kurnia, T. (2021). *Vaksin Sinovac Gagal Dapat Izin WHO di April 2021*. Beijing: Liputan6.com.
- MUI, K. I. (2021). *BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim*. Jakarta: MUI.
- Muprhy, K. (2004). The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders. *Law and Human Behaviour*.
- Nawawi, H. H. (2015). Metode Penelitian Bidang Sosial. In H. H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, M. (2004). Metode Penelitian.
- Nurita, D. (2021). *Survei SMRC: Warga DKI Jakarta Tertinggi Menolak Vaksinasi Covid-19*. Jakarta: Tempo.
- Organization, W. H. (2021, May 3). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*.
- Pangaribuan, M. (2021, Januari). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 2.
- Pranita, E. (2021). *Setahun Pandemi Covid-19, Ini 6 Teori Konspirasi Menyesatkan di Dunia*. Jakarta: Kompas.
- Puspitasari, L. (2020). *Pandemi, Komunikasi Risiko, dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: detikNews.
- RI, K. K. (2020). *Tenaga Kesehatan Perlu Pahami Komunikasi Risiko*. Jakarta: bppsdmk.kemkes.go.id.
- Tasnim. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tobing, A. G. (2021). *Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 30 Maret 2021*. Jakarta: BeritaJakarta.
- Wiryono, S. (2021). *Wagub DKI: Kecepatan Penyebaran Covid-19 di Jakarta Lebih Cepat dari Buat Masker*. Jakarta: Kompas.
- Zalukhu, J. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Psikologis Masyarakat.
- Zein, R. A. (2019, Juni 16). Sikap Anti-Sains: Mengapa partisan cenderung berpikir konspiratif?